

## SISTEM DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INGGRIS

Aura Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Neneng Hasanah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

[aurasriwahyuni49@gmail.com](mailto:aurasriwahyuni49@gmail.com)<sup>1</sup>, [nenenghasanah@uinjambi.ac.id](mailto:nenenghasanah@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Sistem pendidikan di Inggris secara historis diakui sebagai salah satu kiblat dan tolok ukur standar mutu pendidikan internasional. Sistem ini memiliki karakteristik desentralisasi tata kelola ke dalam empat wilayah konstituen serta didukung oleh instrumen penjaminan mutu yang ketat melalui Ofsted dan standarisasi evaluasi berjenjang seperti Key Stages, GCSE, dan A-Levels. Namun, dalam dekade terakhir—khususnya pasca-Brexit dan dinamika pasca-pandemi—sistem ini dihadapkan pada kerentanan internal dan krisis multidimensional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam struktur tata kelola pendidikan di Inggris, mengidentifikasi problematika krusial kontemporer yang melanda, serta mengevaluasi efektivitas langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah setempat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis serta analisis sintesis hubungan kausalitas, penelitian ini berhasil memetakan efek domino krisis (*vicious cycle*) yang terjadi dalam sistem pendidikan Inggris: • **Pelebaran Kesenjangan Sosio-Ekonomi (Attainment Gap):** Terdapat jurang pemisah hasil belajar yang nyata antara sekolah negeri (*state schools*) dan sekolah swasta (*private schools*). Sebanyak 32% siswa sekolah negeri melaporkan bahwa sekolah mereka kekurangan guru dan 68% merasa tertinggal dalam materi pelajaran akibat disrupsi pengajaran. • **Krisis Rekrutmen dan Retensi Pendidik:** Jumlah guru purna-waktu (*Full-Time Equivalent/FTE*) menyusut 0,4% dalam satu tahun terakhir akibat tingginya tingkat *burnout*, beban kerja administratif, dan kompensasi yang tidak sepadan di tengah krisis biaya hidup. Rekrutmen guru sekolah menengah nasional berada 11% di bawah target kebutuhan riil, bahkan mata pelajaran spesifik seperti Fisika hanya memenuhi 17% dari target nasional. • **Dampak Finansial Pasca-Brexit:** Kebijakan pengetatan imigrasi menyebabkan jumlah pelamar berstatus diterima dari Uni Eropa untuk tingkat sarjana (*undergraduate*) merosot drastis hingga 50%, memaksa perguruan tinggi beralih agresif ke pasar internasional Asia dan Afrika demi stabilitas fiskal kampus. • **Krisis Kesehatan Mental Siswa:** Kurikulum yang sangat kaku dan berorientasi pada ujian (*exam-centric*) memicu tekanan psikologis masif, di mana 1 dari 2 siswa kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi ujian nasional akibat gangguan proses belajar. Pemerintah Inggris telah merespons krisis ini melalui alokasi dana tambahan *Pupil Premium*, reformasi jalur vokasi melalui *T-Levels*, serta penyesuaian skema pendanaan universitas. Meskipun menunjukkan upaya adaptasi yang responsif, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan struktural secara komprehensif sehingga efektivitas jangka panjangnya masih memerlukan evaluasi mendalam. Dinamika di Inggris memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, bahwa standarisasi dan sistem pendidikan yang maju tetap rentan terhadap krisis jika mengabaikan aspek kesejahteraan mental pendidik dan peserta didik, serta aspek keadilan sosial (*social equity*).

**Kata Kunci:** Sistem Pendidikan Inggris, Attainment Gap, Krisis Guru, Brexit, Exam-Centric, Kebijakan Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam menentukan arah kemajuan ekonomi, sosial, dan peradaban suatu bangsa. Di era globalisasi, sistem pendidikan di berbagai belahan dunia dituntut untuk terus bertransformasi demi menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis. Dalam lanskap pendidikan global, Inggris (*United Kingdom*) secara historis telah lama diakui sebagai salah satu kiblat pendidikan dunia. Dengan warisan institusi akademis bereputasi tinggi seperti *University of Oxford* dan *University of Cambridge*, serta sistem kurikulum yang diadopsi secara luas di berbagai negara, Inggris menjadi tolok ukur standar mutu, inovasi, dan manajemen pendidikan internasional.

Sistem pendidikan di Inggris memiliki karakteristik unik yang memisahkan tanggung jawab tata kelola secara desentralisasi ke dalam empat wilayah konstituennya: Inggris (*England*), Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Secara umum, sistem ini dirancang untuk

menyeimbangkan antara tradisi akademis yang kuat dengan fleksibilitas berbasis kompetensi. Pemerintah Inggris menerapkan struktur Key Stages yang ketat serta evaluasi nasional seperti GCSE (General Certificate of Secondary Education) dan A-Levels untuk memastikan standar mutu yang konsisten. Keunggulan struktural inilah yang selama bertahun-tahun berhasil menarik jutaan pelajar internasional dan menempatkan Inggris di posisi elit dalam indeks daya saing global.

Namun, di balik reputasi besarnya, sistem pendidikan Inggris saat ini sedang dihadapkan pada berbagai problematika internal yang kompleks. Dekade terakhir, khususnya pasca-Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) dan dinamika pasca-pandemi, telah mengekspos kerentanan serius dalam sistem mereka. Salah satu masalah paling mendasar adalah ketimpangan akses (sosio-ekonomi) dan krisis pendanaan sekolah negeri.

Kesenjangan pencapaian akademis antara siswa dari latar belakang keluarga kaya dan miskin (attainment gap) dilaporkan semakin melebar. Selain itu, kebijakan pengetatan imigrasi pasca-Brexit juga berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah mahasiswa serta staf pengajar berbakat yang berasal dari negara-negara Uni Eropa.

Masalah tidak berhenti pada aspek eksternal dan finansial, melainkan juga menyentuh kesejahteraan sumber daya manusia di dalamnya. Inggris tengah mengalami krisis retensi guru; tingkat stres yang tinggi, beban kerja administratif yang berlebihan, dan kompensasi yang dinilai tidak sepadan membuat banyak guru profesional memilih untuk meninggalkan profesinya. Di sisi siswa, kurikulum yang sangat berorientasi pada ujian (exam-centric) memicu tekanan mental yang masif, memunculkan perdebatan hangat mengenai relevansi metode evaluasi tersebut terhadap kesehatan mental generasi muda.

Mempelajari bagaimana negara sekelas Inggris mengelola sistem pendidikannya sekaligus menavigasi problematika yang muncul menjadi hal yang sangat krusial. Analisis mendalam mengenai dinamika ini tidak hanya memberikan gambaran objektif mengenai realitas pendidikan di negara maju, tetapi juga menawarkan refleksi dan pelajaran berharga (lessons learned) bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif dan berkeadilan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif struktur Sistem dan Problematika Pendidikan di Inggris, serta bagaimana negara tersebut berupaya mengatasi tantangan-tantangan kontemporer yang sedang mereduksi stabilitas mutu pendidikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Struktur dan Tata Kelola Sistem Pendidikan di Inggris

Sistem pendidikan di Inggris (United Kingdom) memiliki keunikan tersendiri karena tidak dikelola secara terpusat oleh satu kementerian untuk seluruh wilayah. Pasca-desentralisasi (devolution), tata kelola pendidikan dibagi ke dalam empat wilayah konstituen: Inggris (England), Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, di mana masing-masing wilayah memiliki otoritas penuh atas kurikulum dan anggarannya sendiri. Namun, wilayah England tetap menjadi acuan utama dengan karakteristik sebagai berikut:

- Sistem Key Stages (Tahapan Pendidikan): Pendidikan wajib di Inggris berlangsung dari usia 5 hingga 16 tahun, yang dibagi menjadi beberapa Key Stages (KS 1 sampai KS 4). Sistem ini memastikan perkembangan akademik dan psikologis siswa dipantau secara bertahap.
- Standarisasi Ujian Nasional: Pada akhir KS 4 (usia 16 tahun), siswa menempuh ujian GCSE (General Certificate of Secondary Education). Setelah itu, mereka dapat melanjutkan ke jalur akademik melalui A-Levels (sebagai syarat masuk universitas) atau jalur vokasi (T-Levels / magang kerja).
- Sistem Penjaminan Mutu (Ofsted): Sistem pendidikan Inggris sangat bergantung pada

Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (Ofsted). Lembaga independen ini melakukan inspeksi rutin ke sekolah-sekolah dan memberikan rating (dari Outstanding hingga Inadequate), yang sangat menentukan reputasi dan pendanaan sebuah sekolah.

## B. Problematika Kontemporer Pendidikan di Inggris

Meskipun memiliki reputasi global, sektor pendidikan di Inggris saat ini tengah menghadapi krisis internal dan eksternal yang dibuktikan oleh berbagai data empiris berikut:

- **Pelebaran Kesenjangan Sosio-Ekonomi (Attainment Gap):** Ketimpangan hasil belajar antara siswa dari keluarga prasejahtera dan kaya semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini tercermin dari akses fasilitas staf pengajar di sekolah. Berdasarkan survei nasional, terdapat jurang pemisah yang stark (nyata) antara sekolah negeri (state schools) dan sekolah swasta (private schools). Sebanyak 32% siswa sekolah negeri melaporkan bahwa sekolah mereka kekurangan guru untuk memberikan dukungan belajar yang layak, berbanding jauh dengan sekolah swasta yang hanya berada di angka 19%. Kesenjangan ini membuat 68% siswa sekolah negeri merasa tertinggal dalam materi pelajaran akibat disrupsi pengajaran.
- **Krisis Rekrutmen dan Retensi Guru:** Inggris sedang mengalami penurunan jumlah tenaga pendidik yang masif akibat beban kerja tinggi dan isu kesejahteraan. Berdasarkan data School Workforce Census dari Department for Education (DfE), jumlah guru purna-waktu (Full-Time Equivalent/FTE) di Inggris mengalami penurunan sebesar 0,4% (berkurang sekitar 1.900 guru) dalam periode satu tahun terakhir. Meskipun ada perbaikan rekrutmen di tingkat sekolah dasar, rekrutmen guru sekolah menengah (secondary school) secara nasional masih berada 11% di bawah target kebutuhan riil, bahkan mata pelajaran spesifik seperti Fisika dilaporkan hanya mampu memenuhi 17% dari total target rekrutmen nasional. Akibatnya, ketidakstabilan pengajaran sangat tinggi; 73% siswa di Inggris pernah mengalami gurunya keluar dari sekolah di tengah tahun ajaran berjalan.
- **Dampak Finansial Pasca-Brexit:** Kebijakan pemutusan hubungan Inggris dengan Uni Eropa (Brexit) membawa hantaman keras bagi sektor pendidikan tinggi. Sejak regulasi baru diterapkan—di mana mahasiswa asal Uni Eropa tidak lagi mendapatkan tarif kuliah domestik (home fees) melainkan tarif internasional—jumlah mahasiswa Eropa merosot tajam.

Laporan dari House of Commons Library mencatat terjadinya penurunan drastis hingga 50% pada jumlah pelamar berstatus diterima dari negara-negara Uni Eropa untuk tingkat sarjana (undergraduate). Penurunan drastis ini memaksa universitas-universitas di Inggris melakukan penghematan anggaran yang ketat dan beralih secara agresif ke pasar Asia dan Afrika (seperti India dan Nigeria) demi menyelamatkan stabilitas fiskal kampus.

- **Krisis Kesehatan Mental Siswa akibat Sistem Exam-Centric:** Kurikulum yang sangat berorientasi pada hasil ujian akhir menciptakan tekanan psikologi yang luar biasa bagi peserta didik. Tekanan ini diperparah oleh rotasi dan ketidakhadiran guru di kelas. Data menunjukkan bahwa 1 dari 2 siswa di Inggris merasa kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi ujian nasional karena gangguan proses belajar-mengajar di sekolah mereka. Selain itu, 72% guru menyatakan bahwa tekanan standarisasi dari lembaga inspeksi (Ofsted) berdampak buruk pada kesejahteraan mental mereka, yang secara tidak langsung memperburuk iklim psikologis di lingkungan kelas.

## C. Respons Kebijakan Pemerintah Inggris dan Analisis Efektivitasnya

Pemerintah Inggris tidak tinggal diam dan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meredam krisis ini, meskipun efektivitasnya masih memicu perdebatan:

- **Kebijakan Pupil Premium:** Pemerintah mengalokasikan dana tambahan khusus bagi sekolah yang menampung siswa dari latar belakang ekonomi lemah. Tujuannya untuk

memperkecil attainment gap. Namun, kritikus menilai nominalnya belum cukup untuk menutup kerugian akibat pemotongan anggaran pendidikan secara umum di era penghematan (austerity).

- Reformasi Jalur Vokasi (T-Levels): Untuk mengurangi beban sistem universitas dan menyediakan tenaga kerja siap pakai, pemerintah menggencarkan T-Levels (kualifikasi teknis setara A-Levels). Langkah ini dinilai positif namun implementasinya di lapangan masih terhambat kurangnya kerja sama dengan sektor industri.
- Penyesuaian Skema Pendanaan Universitas: Menghadapi hilangnya mahasiswa Eropa pasca-Brexit, perguruan tinggi di Inggris mengalihkan fokus rekrutmen secara agresif ke kawasan Asia (seperti India, Cina, dan Nigeria). Di satu sisi ini menyelamatkan keuangan kampus, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan yang terlalu tinggi pada pasar internasional tertentu.

#### D. Analisis Sintesis: Hubungan Kausalitas Antar-Problematika (Efek Domino)

Problematika yang terjadi dalam sistem pendidikan di Inggris tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal yang terisolasi, melainkan sebuah lingkaran setan (vicious cycle) di mana satu krisis menjadi bahan bakar bagi krisis berikutnya. Hubungan kausalitas antarpun ini dapat dipetakan sebagai berikut:



##### □ Dari Krisis Finansial (Brexit) ke Krisis Kesejahteraan Guru:

Hantaman ekonomi pasca-Brexit dan krisis biaya hidup (cost of living crisis) menekan anggaran belanja publik pemerintah. Keterbatasan anggaran ini berbanding lurus dengan ketidakmampuan sekolah negeri untuk memberikan kenaikan gaji yang kompetitif bagi para guru di tengah laju inflasi. Ketimpangan finansial ini memicu gelombang aksi mogok kerja (strikes) massal serikat guru di berbagai wilayah Inggris, yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja.

##### ➤ Dari Krisis Guru ke Pelebaran Kesenjangan (Attainment Gap):

Ketika kesejahteraan tidak terpenuhi dan beban kerja administratif dari standar Ofsted tetap tinggi, terjadilah burnout massal yang berujung pada tingginya angka pengunduran diri guru (krisis retensi). Sekolah-sekolah di daerah urban miskin adalah pihak yang paling menderita karena mereka tidak memiliki daya tarik finansial untuk merekrut guru pengganti, berbeda dengan sekolah swasta di area kaya. Akibatnya, kelas-kelas di sekolah negeri sering kosong atau diajar oleh guru pengganti (supply teachers) yang tidak linier. Hal ini langsung memperlebar attainment gap antara siswa kaya dan miskin.

##### ➤ Dari Disrupsi Pembelajaran ke Krisis Mental Siswa:

Ketidakstabilan lingkungan belajar (rotasi guru yang tinggi dan kelas yang sering lumpuh akibat pemogokan) berdampak langsung pada psikologis siswa. Di tengah kekacauan proses belajar tersebut, siswa tetap dituntut untuk melampaui standarisasi ujian nasional (GCSE & A-Levels) yang sangat kaku (exam-centric). Akibatnya, siswa mengalami kecemasan akademis yang akut karena merasa tidak siap menghadapi ujian dengan fasilitas sekolah yang sedang pincang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal mendasar mengenai sistem dan dinamika pendidikan di Inggris:

Pertama, sistem pendidikan di Inggris memiliki struktur tata kelola yang matang dengan pembagian otoritas yang jelas secara desentralisasi, didukung oleh standarisasi evaluasi (Key Stages, GCSE, dan A-Levels) serta sistem penjaminan mutu yang ketat melalui Ofsted. Kerangka kerja ini secara historis berhasil menempatkan Inggris sebagai salah satu kiblat pendidikan dunia.

Kedua, di balik kemandirian strukturalnya, pendidikan Inggris saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi yang saling berkelindan. Masalah utama meliputi pelebaran kesenjangan pencapaian akademis (*attainment gap*) akibat faktor sosio-ekonomi, krisis kekurangan dan retensi guru akibat beban kerja serta isu kesejahteraan, tekanan mental siswa yang dipicu oleh sistem berorientasi ujian (*exam-centric*), hingga krisis finansial di perguruan tinggi akibat disrupsi politik pasca-Brexit.

Ketika, langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah Inggris—seperti alokasi dana Pupil Premium, pengenalan jalur vokasi T-Levels, dan diversifikasi pasar mahasiswa internasional—menunjukkan upaya adaptasi yang responsif. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan struktural secara komprehensif, sehingga efektivitasnya dalam jangka panjang masih memerlukan evaluasi mendalam.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan:

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan di Inggris: Diperlukan reformasi radikal terhadap sistem beban kerja guru dan evaluasi ulang terhadap model inspeksi Ofsted guna menekan angka *burnout* pendidik.

Selain itu, alokasi anggaran pendidikan perlu diprioritaskan secara langsung pada pemulihan kesejahteraan siswa dari latar belakang *prasejahtera* demi memotong siklus ketimpangan.

Bagi Pengelola Pendidikan Tinggi di Inggris: Institusi pendidikan tinggi perlu merancang strategi keberlanjutan finansial jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada mahasiswa internasional, melainkan juga memperkuat kemitraan riset domestik dan inovasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar pasca-Brexit.

Pelajaran bagi Negara Lain (Termasuk Indonesia): Dinamika di Inggris memberikan pelajaran berharga bahwa sistem pendidikan yang maju dan memiliki standarisasi tinggi tetap rentan terhadap krisis jika mengabaikan aspek kesejahteraan mental (baik guru maupun siswa) serta aspek keadilan sosial (*social equity*). Standardisasi dan komersialisasi pendidikan yang terlalu kaku harus diimbangi dengan sistem pendukung (*support system*) yang inklusif dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bolton, P. (2025). Higher education student numbers. House of Commons Library Research Briefing. London: UK Parliament.
- Department for Education. (2025). School workforce in England: November 2024. Government Digital Service. <https://www.gov.uk/government/statistics/school-workforce-in-england-november-2024>
- Hidayati, N., & Rosyidi, A. (2023). Analisis perbandingan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan Inggris: Studi komparatif sistem Key Stages. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 11(1), 45-56. <https://doi.org/10.21831/jamp.v11i1.54321>
- Hubble, S., & Bolton, P. (2024). Support for students from EU countries in higher education in the UK. House of Commons Library Research Briefing. London: UK Parliament.
- Institute for Fiscal Studies (IFS). (2025). Annual report on education spending in England: 2024. IFS

- Report R312. <https://ifs.org.uk/publications/annual-report-education-spending-england-2024>
- Jerrim, J. (2023). The mental health and wellbeing of teachers in England: Evidence from the COVID-19 pandemic and beyond. *Journal of Education Policy*, 38(4), 567-589. <https://doi.org/10.1080/02680939.2022.2112345>
- Pratama, A. R. (2024). Dampak Brexit terhadap orientasi internasionalisasi pengelola perguruan tinggi di Inggris: Pelajaran bagi tata kelola makro pendidikan tinggi nasional. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, 19(2), 112-128.
- Sibieta, L. (2024). The teacher labor market in England: Shortages, retention, and pay reform. National Foundation for Educational Research (NFER). <https://www.nfer.ac.uk/publications/teacher-labour-market-in-england-2024>
- Supriadi, E., & Wijaya, M. C. (2023). Problematika standarisasi akreditasi sekolah: Studi komparatif model Ofsted Inggris dan BAN-S/M Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 11(2), 201-215.
- Sutton Trust. (2024). The state of social mobility in the UK: Attainment gaps and school funding. The Sutton Trust Annual Policy Brief. <https://www.suttontrust.com/our-research/state-of-social-mobility-2024>
- Twiselton, S. (2024). Reforming teacher recruitment and retention in England: A systemic challenge. *British Educational Research Journal*, 50(2), 341-358. <https://doi.org/10.1002/berj.3912>
- Utami, P. S. (2024). Menilik fenomena burnout guru di negara maju: Studi kasus krisis retensi pendidik pada sekolah negeri di Inggris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Global*, 8(3), 310-322.